

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN NASIONAL: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS

Istha Herlitha¹, Sirajuddin Saleh², Lala Vitaloka³, Evi Kurnia Kadir⁴,
Amin Rais⁵, Mega Purnama⁶, Sabbi Hisma⁷

¹⁻⁷Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Makassar

¹isthaerlitha84@gmail.com, ²sirajuddin.saleh@unm.ac.id

³lalavitaloka13@gmail.com, ⁴evikurniakadir91@gmail.com

⁵mhegapurnama@gmail.com, ⁶amintokenawa@gmail.com

⁷hismasabbi23@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze development trends, thematic structures, and scientific collaboration patterns in the research on national assessment policy implementation through a systematic literature review approach. The primary focus of this research is to identify the dynamics of scientific publications, knowledge structures, and dominant actors in the development of national assessment policy research within a global context. The research method employs a bibliometric approach using VOSviewer and Biblioshiny software to analyze publication data that has undergone a screening process, resulting in 35 articles that met the inclusion criteria. The analysis was conducted across three main dimensions: Annual Scientific Production and Most Relevant Sources to examine publication trends, keyword co-occurrence analysis to map the thematic structure, and author and country collaboration analysis to understand knowledge production networks. The findings indicate that the study of national assessment policy implementation experiences fluctuating growth with a significant increase in the final period, dominated by themes such as PISA, OECD, and large-scale assessment. Furthermore, the study reveals an imbalance in author and country contributions, with developed nations remaining the dominant actors in knowledge production. In conclusion, this research underscores that the implementation of national assessment policies is evolving within a framework of global education governance, which is heavily influenced by the logic of standardization, educational datafication, and global knowledge structure inequalities.

Keywords: *assessment, policy, evaluation, governance, education*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren perkembangan, struktur tematik, dan pola kolaborasi ilmiah dalam kajian implementasi kebijakan asesmen nasional melalui pendekatan *systematic literature review*. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi dinamika publikasi ilmiah, struktur pengetahuan, serta aktor dominan dalam perkembangan riset kebijakan asesmen nasional pada konteks global. Metode penelitian menggunakan pendekatan bibliometrik dengan bantuan perangkat lunak VOSviewer dan Biblioshiny untuk menganalisis data publikasi yang telah melalui proses *screening*, sehingga diperoleh 35 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Analisis dilakukan melalui tiga dimensi utama, yaitu *Annual Scientific*

Production dan *Most Relevant Sources* untuk melihat tren publikasi, analisis *keyword co-occurrence* untuk memetakan struktur tematik, serta analisis kolaborasi penulis dan negara untuk memahami jaringan produksi pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian implementasi kebijakan asesmen nasional mengalami pertumbuhan fluktuatif dengan peningkatan signifikan pada periode akhir, didominasi oleh tema PISA, OECD, dan *large-scale assessment*. Selain itu, ditemukan adanya ketimpangan kontribusi penulis dan negara, di mana negara maju masih menjadi aktor dominan dalam produksi pengetahuan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan asesmen nasional berkembang dalam kerangka *global education governance* yang dipengaruhi oleh logika standardisasi, datafikasi pendidikan, dan ketimpangan struktur pengetahuan global.

Kata Kunci: asesmen, kebijakan, evaluasi, tata kelola, pendidikan

A. Pendahuluan

Perkembangan sistem pendidikan global dalam dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan mekanisme evaluasi berbasis standar, khususnya melalui implementasi kebijakan asesmen berskala nasional dan internasional. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan negara untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas sistem pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif. Dalam konteks ini, asesmen nasional tidak hanya dipahami sebagai alat pengukuran hasil belajar, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan berbasis bukti (*evidence-*

based policy) (OECD, 2013; Braun & Kanjee, 2011). Transformasi kebijakan pendidikan berbasis asesmen ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi dan meningkatnya peran organisasi internasional seperti OECD, World Bank, dan UNESCO dalam membentuk agenda pendidikan nasional. Program seperti PISA dan TIMSS telah menjadi rujukan utama dalam mengukur kualitas pendidikan antarnegara, sehingga mendorong negara-negara untuk mengadopsi sistem evaluasi serupa dalam bentuk asesmen nasional (Sellar & Lingard, 2014; Meyer & Benavot, 2013). Dalam perspektif ini, asesmen menjadi bagian dari mekanisme *global governance of education*, di mana standar internasional berfungsi sebagai alat kontrol dan

perbandingan kinerja sistem pendidikan nasional.

Konsep *datafication of education* menjelaskan bagaimana proses pendidikan semakin bergantung pada data kuantitatif untuk menentukan keberhasilan sistem pendidikan (Williamson, 2017). Dalam kerangka ini, asesmen nasional tidak hanya menghasilkan informasi akademik, tetapi juga menjadi bagian dari infrastruktur data yang digunakan untuk mengatur sekolah, guru, dan siswa. Data asesmen kemudian digunakan untuk mengembangkan kebijakan berbasis indikator yang berorientasi pada efisiensi dan akuntabilitas (Selwyn, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan telah mengalami transformasi menuju sistem yang lebih teknokratis dan berbasis pengukuran. Selain itu, dalam perspektif *neoliberal education policy*, asesmen nasional sering digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kompetisi antar sekolah dan sistem pendidikan. Kebijakan ini menekankan pentingnya performativitas, di mana sekolah dan guru dievaluasi berdasarkan hasil yang dapat diukur secara kuantitatif (Ball, 2003). Akibatnya, asesmen nasional tidak hanya berfungsi

sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang memengaruhi praktik pedagogis di tingkat sekolah. Dalam banyak kasus, tekanan terhadap hasil asesmen dapat menggeser fokus pembelajaran dari pengembangan kompetensi holistik menjadi sekadar pencapaian skor ujian.

Dalam perkembangan teoritis lainnya, konsep *policy instrumentation* menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa regulasi, tetapi juga instrumen teknis seperti standar, indikator, dan sistem evaluasi (Lascombes & Le Galès, 2007). Dalam konteks asesmen nasional, instrumen ini berfungsi untuk mengarahkan perilaku aktor pendidikan melalui mekanisme pengukuran dan pelaporan. Dengan demikian, asesmen nasional menjadi bagian dari sistem kontrol administratif yang kompleks dalam tata kelola pendidikan modern. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi asesmen nasional memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pendidikan, baik dari aspek kebijakan, praktik pengajaran, maupun hasil belajar siswa. Studi oleh Hopfenbeck et al. (2018) menunjukkan bahwa

hasil asesmen internasional sering digunakan sebagai dasar reformasi kurikulum nasional. Sementara itu, penelitian Grek (2009) menegaskan bahwa data asesmen global telah menciptakan rezim akuntabilitas baru dalam pendidikan yang mengubah cara negara mengelola sistem pendidikannya.

Namun demikian, implementasi asesmen nasional juga menghadapi kritik dari perspektif kritis pendidikan. Beberapa ahli berpendapat bahwa dominasi asesmen berbasis standar dapat mengurangi ruang pedagogis guru dan mengabaikan konteks sosial budaya lokal (Au, 2016; Sahlberg, 2011). Selain itu, ketergantungan pada data kuantitatif berpotensi menyederhanakan kompleksitas proses pendidikan yang bersifat multidimensional. Dalam konteks global, penelitian mengenai asesmen nasional juga menunjukkan adanya ketimpangan produksi pengetahuan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan negara OECD lainnya mendominasi literatur dan pengembangan teori dalam bidang asesmen pendidikan, sementara negara berkembang lebih banyak berperan sebagai pengguna kebijakan (Martens et al., 2016). Hal

ini mencerminkan adanya hierarki pengetahuan dalam global education governance yang perlu dikaji lebih lanjut.

Analisis bibliometrik dalam beberapa studi menunjukkan bahwa tema utama dalam penelitian asesmen nasional meliputi PISA, OECD, large-scale assessment, dan educational accountability. Namun, kajian tersebut masih didominasi oleh pendekatan makro dan belum banyak mengeksplorasi dinamika implementasi kebijakan di tingkat nasional secara komprehensif. Selain itu, hubungan antara struktur kolaborasi ilmiah, perkembangan tema, dan distribusi geografis penelitian masih belum banyak dianalisis secara terintegrasi. Meskipun terdapat berbagai penelitian mengenai asesmen nasional, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana struktur pengetahuan berkembang secara sistematis dalam literatur ilmiah global. Sebagian besar studi sebelumnya lebih berfokus pada aspek kebijakan atau hasil asesmen, tanpa mengintegrasikan analisis bibliometrik untuk melihat perkembangan tren, tema, dan kolaborasi ilmiah secara menyeluruh.

Selain itu, belum banyak penelitian yang menggabungkan analisis *performance*, *science mapping*, dan *network analysis* dalam satu studi komprehensif. Gap penelitian ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih sistematis untuk memetakan perkembangan literatur implementasi kebijakan asesmen nasional secara global. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan bibliometrik untuk menganalisis tren publikasi, struktur tematik, serta pola kolaborasi ilmiah dalam bidang asesmen nasional.

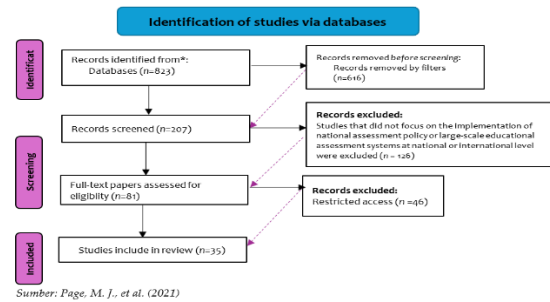
Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan penelitian implementasi kebijakan asesmen nasional secara global melalui pendekatan bibliometrik. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tren publikasi ilmiah dan pola pertumbuhan penelitian, (2) mengidentifikasi struktur tematik dan jaringan kata kunci utama dalam literatur, serta (3) memetakan pola kolaborasi ilmiah antar penulis dan negara dalam kajian implementasi kebijakan asesmen nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic literature review* (SLR) dengan protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) sebagai kerangka utama dalam proses identifikasi, penyaringan, dan seleksi literatur (Page et al., 2021) untuk menganalisis implementasi kebijakan asesmen nasional. Pencarian literatur dilakukan melalui database Scopus menggunakan kata kunci yang relevan dengan fokus penelitian, menghasilkan 823 dokumen pada tahap awal. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan berdasarkan kriteria inklusi yang meliputi artikel jurnal, rentang tahun publikasi, bahasa Inggris, serta bidang *Social Sciences*, *Arts and Humanities*, dan *Psychology*, sehingga diperoleh 207 artikel. Tahap akhir seleksi dilakukan menggunakan Rayyan untuk menghapus duplikasi serta menilai relevansi berdasarkan judul, abstrak, dan isi, sehingga diperoleh 35 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis lebih lanjut.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan

bibliometrik dengan bantuan software **Biblioshiny** (R-package **Bibliometrix**) dan **VOSviewer**. Untuk menjawab **RQ1**, analisis *performance analysis* digunakan melalui Biblioshiny yang mencakup *annual scientific production*, *citation analysis*, dan *most relevant sources* untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan publikasi dan kontribusi jurnal utama. Untuk menjawab **RQ2**, digunakan *science mapping analysis* melalui VOSviewer yang meliputi *keyword co-occurrence analysis* untuk memetakan struktur tematik, klaster utama, serta hubungan antar konsep dalam literatur kebijakan asesmen nasional. Sementara itu, untuk menjawab **RQ3**, digunakan kombinasi *co-authorship analysis* dan *country collaboration analysis* melalui Biblioshiny dan VOSviewer untuk mengidentifikasi pola kolaborasi penulis, institusi, dan negara dalam produksi pengetahuan ilmiah. Seluruh hasil visualisasi kemudian diinterpretasikan secara tematik untuk menggambarkan evolusi struktur pengetahuan dalam implementasi kebijakan asesmen nasional. Adapun alur seleksi literatur disajikan pada **Gambar 1 (PRISMA Flow Diagram)** berikut:



Gambar 1. PRISMA Flow Diagram – Proses Identifikasi dan Seleksi Literatur

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tren Publikasi dan Pola Pertumbuhan Ilmiah Penelitian Kebijakan Penilaian Nasional

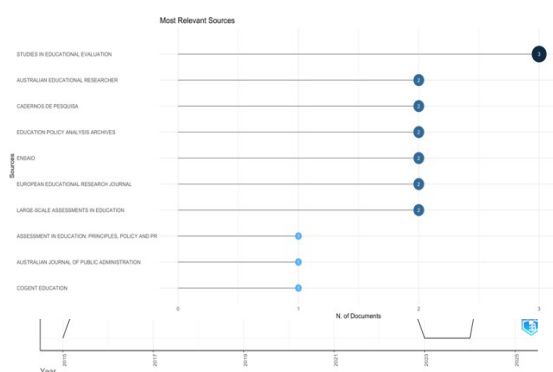
Bagian ini menyajikan tren publikasi dan pola pertumbuhan ilmiah penelitian terkait kebijakan asesmen nasional. Analisis difokuskan pada *Annual Scientific Production* yang menggambarkan perkembangan jumlah publikasi dari tahun ke tahun serta dinamika pertumbuhan minat akademik dalam bidang ini. Selain itu, analisis *Most Relevant Sources* digunakan untuk mengidentifikasi jurnal-jurnal yang paling produktif dan berpengaruh, sehingga dapat menunjukkan tingkat visibilitas serta kontribusi utama sumber ilmiah dalam perkembangan kajian kebijakan asesmen nasional di

tingkat global.

Gambar 2. Annual Scientific
Production

Gambar 3. Most Relevant Sources

Hasil analisis *Annual Scientific Production* dan *Most Relevant Sources* menunjukkan bahwa penelitian implementasi kebijakan asesmen nasional mengalami



perkembangan yang bersifat fluktuatif namun meningkat secara signifikan pada periode akhir, dengan puncak publikasi pada tahun 2025. Pola ini merefleksikan evolusi kajian dari tahap awal yang masih terbatas pada diskursus *large-scale assessment* seperti PISA dan TIMSS (Niemann et al., 2017; Martens et al., 2016), menuju fase penguatan implementasi kebijakan, akuntabilitas, dan evaluasi sistem pendidikan. Peningkatan terutama pada periode 2018–2021 hingga lonjakan 2024–2025 menunjukkan bahwa asesmen nasional semakin diposisikan sebagai instrumen kebijakan berbasis data

(*data-driven policy*) yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan tata kelola pendidikan (Clark & Karvonen, 2021; Copp, 2017; Sandoval-Hernández et al., 2025). Perubahan ini juga selaras dengan teori *policy instrumentation* dalam governance pendidikan yang menempatkan asesmen sebagai alat regulasi dan kontrol sistem pendidikan modern (Candido, 2020; Steiner-Khamisi, 2025).

Dari sisi sumber publikasi, *Studies in Educational Evaluation* muncul sebagai jurnal paling dominan, menegaskan bahwa kajian asesmen nasional masih berakar kuat pada domain evaluasi pendidikan yang berfokus pada pengukuran hasil belajar dan validitas sistem asesmen. Dominasi ini mencerminkan orientasi utama literatur terhadap penguatan assessment sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan (Clark & Karvonen, 2021; Sandoval-Hernández et al., 2025). Sementara itu, kontribusi jurnal lain seperti *Australian Educational Researcher*, *Cadernos de Pesquisa*, *Education Policy Analysis Archives*, *Ensaio*, *European Educational Research Journal*, dan *Large-Scale Assessments in Education*

menunjukkan karakter multidisipliner penelitian yang menghubungkan evaluasi pendidikan dengan kebijakan publik dan tata kelola sistem pendidikan (Niemann et al., 2017; Martens et al., 2016). Adapun jurnal dengan kontribusi lebih kecil seperti *Assessment in Education: Principles, Policy and Practice*, *Australian Journal of Public Administration*, dan *Cogent Education* memperlihatkan perluasan kajian ke ranah administrasi publik dan governance pendidikan, yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan asesmen nasional telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem kebijakan pendidikan yang lebih luas (Copp, 2017; Candido, 2020).

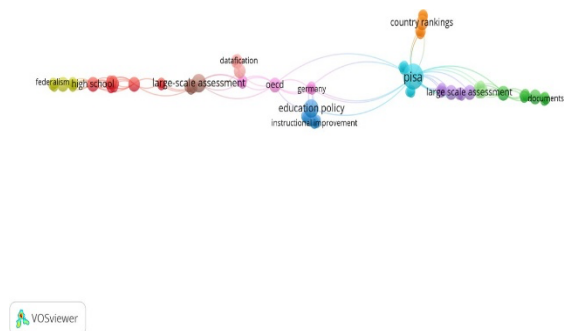
Temuan dari analisis *Annual Scientific Production* dan *Most Relevant Sources* menunjukkan bahwa penelitian implementasi kebijakan asesmen nasional mengalami peningkatan yang fluktuatif namun cenderung menguat pada periode akhir, dengan puncak publikasi pada 2025. Pola ini mencerminkan pergeseran paradigma dari kajian awal yang berfokus pada *large-scale assessment* seperti PISA dan TIMSS

(Niemann et al., 2017; Martens et al., 2016) menuju pemanfaatan asesmen sebagai instrumen tata kelola pendidikan berbasis bukti. Dalam perspektif *datafication of education*, perkembangan ini menegaskan bahwa data asesmen semakin berfungsi sebagai mekanisme utama dalam pengaturan sistem pendidikan modern, di mana asesmen tidak lagi hanya menjadi alat evaluasi hasil belajar, tetapi juga bagian dari *policy instrumentation* yang mengarahkan akuntabilitas dan pengambilan keputusan pendidikan (Candido, 2020; Steiner-Khamisi, 2025). Dominasi *Studies in Educational Evaluation* sebagai sumber utama memperkuat posisi evaluasi pendidikan sebagai pusat epistemik kajian ini, yang tetap bertumpu pada isu validitas dan pengukuran capaian belajar (Clark & Karvonen, 2021; Sandoval-Hernández et al., 2025), sementara keterlibatan jurnal kebijakan publik dan administrasi pendidikan menunjukkan perluasan kajian ke ranah governance dan reformasi sistem pendidikan (Copp, 2017). Kondisi ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan asesmen nasional merupakan fenomena multidisipliner yang merefleksikan

integrasi antara evaluasi pendidikan, kebijakan publik, dan tata kelola pendidikan global dalam kerangka *global education governance* (Niemann et al., 2017; Martens et al., 2016).

Tema Penelitian Dominan dan Struktur Kata Kunci dalam Studi Kebijakan Penilaian Nasional

Untuk menjawab RQ2, analisis ini menyajikan **Gambar 4 berupa network visualization map**, yang menggambarkan struktur tematik dan keterkaitan antar kata kunci dalam penelitian kebijakan asesmen nasional. Visualisasi ini menunjukkan kluster utama yang terbentuk melalui *keyword co-occurrence analysis*, sehingga dapat mengidentifikasi tema-tema dominan, keterhubungan konsep, serta pola struktur intelektual dalam bidang kajian ini..



Gambar 4. Network visualization map

Analisis VOSviewer menunjukkan bahwa struktur konseptual penelitian implementasi kebijakan asesmen

nasional didominasi oleh kata kunci yang saling terhubung dalam beberapa kluster, dengan **“PISA”** sebagai node paling sentral yang merefleksikan kuatnya pengaruh *international large-scale assessment* da

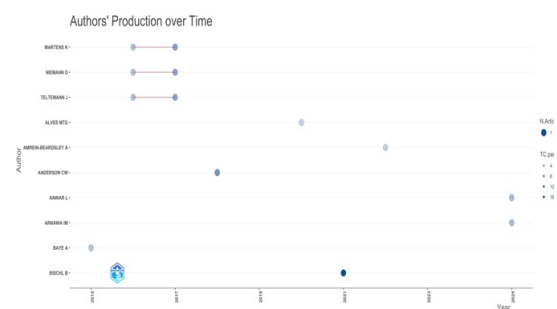
lam pembentukan kebijakan evaluasi pendidikan global (Niemann et al., 2017; Martens et al., 2016). Keterkaitannya dengan *country rankings* menunjukkan orientasi kebijakan berbasis perbandingan kinerja antarnegara, sementara kluster *“large-scale assessment”* dan *“OECD”* menegaskan peran aktor global dalam standarisasi evaluasi pendidikan (Sandoval-Hernández et al., 2025; Steiner-Khamsi, 2025). Selain itu, keterhubungan *“datafication”*, *“education policy”*, dan *“instructional improvement”* menunjukkan bahwa asesmen tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi eksternal tetapi juga sebagai instrumen perbaikan pembelajaran berbasis data (Candido, 2020; Clark & Karvonen, 2021). Variasi kluster seperti *“federalism”* dan *“high school”* mencerminkan perbedaan konteks implementasi kebijakan antarnegara yang dipengaruhi struktur sistem pendidikan dan desentralisasi (Copp,

2017).

Temuan ini menunjukkan bahwa struktur pengetahuan dalam implementasi kebijakan asesmen nasional sangat dipengaruhi oleh logika global standardisasi yang mendorong homogenisasi arah kebijakan pendidikan lintas negara. Dominasi indikator internasional seperti PISA mengindikasikan bahwa kebijakan asesmen bergerak dalam kerangka kompetisi performatif yang berisiko menggeser orientasi pendidikan dari kebutuhan kontekstual lokal menuju logika perbandingan global. Dalam perspektif *neoinstitutional theory*, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk *isomorphism*, di mana organisasi pendidikan mengadopsi praktik yang seragam untuk memperoleh legitimasi dan pengakuan dalam arena global meskipun konteks sosial-budaya berbeda (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). Lebih lanjut, kecenderungan penggunaan data sebagai dasar utama pengambilan keputusan mencerminkan proses *audit culture* dan *technocratic governance* dalam pendidikan, yang berpotensi mereduksi kompleksitas proses pembelajaran menjadi

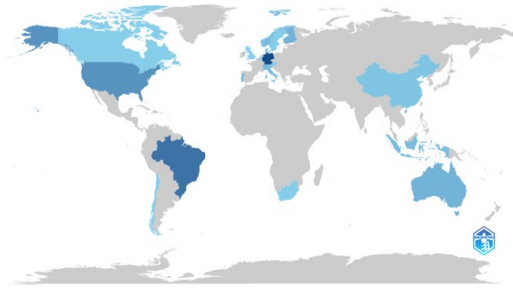
indikator kuantitatif yang terbatas (Power, 1997; Shore & Wright, 2015). Hal ini menimbulkan ketegangan antara fungsi asesmen sebagai instrumen peningkatan kualitas pembelajaran dengan perannya sebagai mekanisme kontrol dan akuntabilitas birokratis. Selain itu, variasi konteks institusional antarnegara menunjukkan bahwa implementasi kebijakan asesmen tidak dapat dipahami sebagai proses yang seragam, sehingga pendekatan *one-size-fits-all* dalam evaluasi global berpotensi mengabaikan perbedaan struktur sosial, budaya, dan kapasitas sistem pendidikan nasional.

Struktur Kolaborasi Antar penulis dan Negara



Gambar 5. Authors' Production over Time

Country Scientific Production



Gambar 6. Most Relevant Sources

Hasil analisis Authors' Production over Time menunjukkan bahwa kontribusi penulis dalam penelitian implementasi kebijakan asesmen nasional tersebar secara temporal dengan pola tidak merata, namun memperlihatkan adanya pergeseran fokus kajian dari fase awal hingga fase terkini. Pada periode 2015–2017, penulis seperti Martens, Niemann, dan Teltemann mendominasi kajian yang berfokus pada international large-scale assessment dan penguatan evaluasi pendidikan global berbasis PISA (Martens et al., 2016; Niemann et al., 2017), kemudian bergeser pada periode 2018–2021 dengan kemunculan penulis seperti Alves, Anderson, dan Amrein-Beardsley yang menekankan implementasi kebijakan asesmen, evaluasi instruksional, serta dampaknya terhadap praktik pendidikan dalam kerangka policy instrumentation (Clark & Karvonen,

2021; Copp, 2017), dan pada periode 2023–2025 muncul penulis seperti Anwar dan Arnawa yang merepresentasikan transformasi menuju digitalisasi asesmen dan data-driven policy dalam konteks datafication of education (Candido, 2020; Steiner-Khamsi, 2025), yang sekaligus menunjukkan semakin kuatnya karakter kolaboratif dan multidisipliner dalam riset ini (Sandoval-Hernández et al., 2025). Sementara itu, hasil analisis Country Scientific Production menunjukkan ketimpangan kontribusi global yang didominasi oleh negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Tiongkok, Brasil, dan Australia, yang merefleksikan kuatnya kapasitas riset dan keterlibatan dalam studi PISA dan TIMSS sebagai basis pengembangan kebijakan berbasis bukti (Niemann et al., 2017; Martens et al., 2016), di mana negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman mendominasi tradisi educational measurement, sementara Tiongkok dan Brasil menunjukkan peningkatan sebagai negara berkembang yang aktif dalam reformasi asesmen berbasis data (Sandoval-Hernández et al., 2025), sedangkan Australia dan negara Eropa lainnya berkontribusi

dalam penguatan evaluasi kebijakan dan akuntabilitas pendidikan (Copp, 2017), sehingga secara keseluruhan pola ini menegaskan adanya ketimpangan pengetahuan global dalam studi asesmen nasional, di mana negara maju berperan sebagai produsen utama pengetahuan sementara negara berkembang lebih banyak berperan sebagai adopter dalam kerangka global education governance (Martens et al., 2016; Niemann et al., 2017).

Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan penulis dan negara dalam penelitian implementasi kebijakan asesmen nasional tidak hanya mencerminkan dinamika produksi ilmiah, tetapi juga merefleksikan struktur kekuasaan pengetahuan dalam ranah *global education governance*. Pergeseran fokus dari kajian *international large-scale assessment* menuju implementasi kebijakan dan akhirnya ke arah digitalisasi serta *data-driven policy* menunjukkan adanya transformasi epistemologis dari evaluasi berbasis komparasi menuju tata kelola pendidikan berbasis data dan teknologi. Dalam perspektif *world society theory*, pola ini dapat dipahami sebagai proses difusi global

di mana model evaluasi pendidikan menyebar secara isomorfik, menghasilkan keseragaman praktik lintas negara meskipun konteks lokal berbeda (Meyer et al., 1997; DiMaggio & Powell, 1983). Namun, ketimpangan kontribusi antarnegara juga menunjukkan adanya hierarki produksi pengetahuan, di mana negara dengan kapasitas riset tinggi mendominasi produksi teori dan metodologi, sementara negara berkembang lebih banyak berada pada posisi adopsi dan adaptasi kebijakan.

Lebih lanjut, dominasi aktor awal dalam studi PISA dan *large-scale assessment* mengindikasikan kuatnya pengaruh rezim pengukuran global dalam membentuk arah kebijakan pendidikan nasional, yang kemudian berkembang menjadi bentuk *audit culture* dalam sistem pendidikan modern. Dalam kerangka ini, asesmen tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol, akuntabilitas, dan regulasi perilaku institusi pendidikan (Power, 1997; Shore & Wright, 2015). Sementara itu, munculnya fase digitalisasi dan *datafication* memperkuat logika teknokratis dalam kebijakan

pendidikan, di mana pengambilan keputusan semakin bergantung pada indikator

kuantitatif yang berpotensi menyederhanakan kompleksitas proses pembelajaran. Ketimpangan kontribusi negara juga menegaskan adanya struktur global yang tidak setara dalam produksi pengetahuan pendidikan, yang mencerminkan relasi asimetris dalam *knowledge economy*, di mana negara maju berperan sebagai produsen utama wacana kebijakan, sedangkan negara berkembang lebih sering menjadi konsumen kebijakan dalam kerangka difusi global pendidikan.

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian implementasi kebijakan asesmen nasional mengalami perkembangan yang meningkat secara fluktuatif dengan lonjakan signifikan pada periode terakhir, yang mengindikasikan pergeseran fokus dari kajian *international large-scale assessment* menuju implementasi kebijakan, evaluasi instruksional, hingga transformasi berbasis *data-driven policy*. Struktur tematik penelitian didominasi oleh klaster

PISA, OECD, dan *large-scale assessment* yang menegaskan kuatnya pengaruh rezim evaluasi global dalam membentuk arah kebijakan asesmen nasional, sekaligus menunjukkan pergeseran menuju *datafication of education* sebagai basis tata kelola pendidikan modern. Dari sisi aktor, kontribusi penulis menunjukkan pola evolutif dari dominasi peneliti awal dalam studi PISA menuju keterlibatan penulis yang lebih beragam pada fase implementasi dan digitalisasi asesmen, yang mencerminkan semakin kuatnya karakter multidisipliner dan kolaboratif dalam riset ini. Sementara itu, analisis berbasis negara menunjukkan ketimpangan global yang jelas, di mana negara maju mendominasi produksi pengetahuan dan berperan sebagai pusat pengembangan teori dan metodologi, sedangkan negara berkembang lebih banyak berada pada posisi adopsi dalam kerangka *global education governance*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kajian implementasi kebijakan asesmen nasional tidak hanya berkembang secara kuantitatif dan tematik, tetapi juga mencerminkan struktur hierarkis pengetahuan global

yang dipengaruhi oleh kekuatan institusional, politik, dan akademik dalam sistem pendidikan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrein-Beardsley, A., Geiger, T., & Winn, K. (2022). U.S. states' performance on NAEP mathematics and reading exams after the implementation of school letter grade accountability policies. *Educational Measurement Journal*.
- Anderson, C. W., de los Santos, E. X., Bodbyl, S., Covitt, B. A., Edwards, K. D., Hancock, J. B., Lin, Q., Morrison Thomas, C., Penuel, W. R., & Welch, M. M. (2018). Designing educational systems to support enactment of the Next Generation Science Standards. *Wiley Periodicals*.
- Au, W. (2016). *Meritocracy 2.0: High-stakes testing and the future of education*. Routledge.
- Ball, S. J. (2003). The teacher's soul and the terrors of performativity. *Journal of Education Policy*, 18(2), 215–228.
- Braun, H., & Kanjee, A. (2011). Large-scale assessment and policy. *Assessment in Education*.
- Braga, D. S., & Miranda, C. C. (2023). Invisible schools: Inequalities in the conditions of facilities and limits of public policy instruments. *Ensaio*.
- Bundsgaard, J. (2019). DIF as a pedagogical tool: Analysis of item characteristics in ICILS. *Educational Measurement Journal*.
- Candido, H. H. D. (2020). Datafication in schools: Enactments of quality assurance and evaluation policies in Brazil. *Educational Policy Analysis Archives*.
- Cipriano, G., & Martins, S. C. (2024). Introducing technologies into national large-scale testing: Are we ready? *Assessment Technology Journal*.
- Clark, A. K., & Karvonen, M. (2021). Instructionally embedded assessment: Theory of action for an innovative system. *Assessment in Education: Principles, Policy and Practice*.
- Copp, D. T. (2017). Policy incentives in Canadian large-scale assessment: How policy levers influence teacher decisions about instructional change. *Journal of Public Administration*.
- Daus, S., & Braeken, J. (2018). The sensitivity of TIMSS country rankings in science achievement. *Large-Scale Assessments in Education*.
- de Macedo, E. P. N. (2021). Philosophy in the National Curriculum Guidelines and ENEM: Temporal and conceptual gaps. *Curriculum Studies Journal*.

- Doz, D. (2019). The national assessment of mathematics in high schools in Italy with Slovene as the language of instruction. *University of Maribor Press*.
- Ehmke, T., van den Ham, A. K., Sälzer, C., Heine, J., & Prenzel, M. (2020). Measuring mathematics competence in international and national large-scale assessments. *Springer*.
- Ferrão, M. E., Prata, P., & Alves, M. T. G. (2020). Multiple imputation in big identifiable data for educational research. *Educational Measurement Review*.
- Freddano, M., & Pandolfini, V. (2022). Teacher training on data literacy for school evaluation and improvement. *International Journal of Teacher Education*.
- Gillis, S., Polesel, J., & Wu, M. (2016). PISA data: Raising concerns with its use in policy settings. *Australian Association for Research in Education*.
- Guerres-Zucco, D., Zanella, A., Coutinho, A. S., & Botelho Néia, J. A. (2022). Evaluation instruments and quality parameters for early childhood education. *Fundação Carlos Chagas*.
- Hidayah, I. R., Sa'dijah, C., Anwar, L., Yerizon, & Arnawa, I. M. (2025). Empowering students' numeracy skills: Mathematics teachers' perceptions. *Curriculum and Instruction Studies*.
- Hilbert, S., Coors, S., Kraus, E., et al. (2021). Machine learning for the educational sciences. *Review of Education*.
- Imlig, F., & Ender, S. (2018). Towards a national assessment policy in Switzerland: Areas of conflict. *Informa UK Limited*.
- Kanjee, A., & Moloi, Q. (2016). A standards-based approach for reporting assessment results in South Africa. *South African Journal of Education*.
- Kauko, J., Centeno, V. G., Candido, H., Shiroma, E., & Klutas, A. (2016). The emergence of quality assessment in Brazilian basic education. *Educational Policy Studies*.
- Landahl, J. (2020). The PISA calendar: Temporal governance and international large-scale assessments. *Informa UK Limited*.
- Li, J., & Xue, E. (2022). Pursuing sustainable higher education admission policy reform in China. *Education Policy Journal*.
- Lunde, I. M., & Piattoeva, N. (2025). The mundane governance of education through time: National testing in Norway. *Education Policy Studies*.
- Martens, K., Niemann, D., & Teltemann, J. (2016). Effects of international assessments in education. *Globalisation, Societies and Education*.

- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*.
- Milner, A. L. (2025). Confronting the disadvantage gap: High-stakes assessment systems. *Educational Leadership Journal*.
- Niemann, D., Martens, K., & Teltemann, J. (2017). PISA and its consequences: Shaping education policies. *Journal of Education Policy*.
- Nortvedt, G. A. (2018). Policy impact of PISA on mathematics education in Norway. *International Journal of Educational Studies*.
- OECD. (2013). *Synergies for better learning: An international perspective on evaluation and assessment*. OECD Publishing.
- Oliveira, D. A., Junior, E. A. P., & Neto, J. L. H. (2025). Quality of basic education: Beyond large-scale cognitive tests. *Educational Evaluation Journal*.
- Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement. *BMJ*.
- Sandoval-Hernández, A., Carrasco, D., & Eryilmaz, N. (2025). A critical evaluation of alignment optimization. *Studies in Educational Evaluation*.
- Savage, G. C., & de Carvalho, D. (2025). Hybridity as a governmental technique for designing and delivering NAPLAN. *Australian Journal of Public Administration*.
- Sellar, S., & Lingard, B. (2014). The OECD and global governance in education. *Globalisation, Societies and Education*.
- Selwyn, N. (2015). *Education and technology*. Bloomsbury.
- Shore, C., & Wright, S. (2015). Governing by numbers: Audit culture and accountability. *Social Anthropology*.
- Steiner-Khamsi, G. (2025). Learning from elsewhere: Policy borrowing in education. *Comparative Education Review*.
- Thomas, D. P. (2020). Rapid decline and gender disparities in NAPLAN writing data. *Australian Educational Researcher*.
- Vitelli, R. F., Fritsch, R., & Corsetti, B. (2018). Educational indicators in basic education assessment. *ANPEd*.
- Williamson, B. (2017). *Big data in education*. SAGE.